

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angger Sigit Pramukti and S. H. Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa: Panduan Mengurus Peralihan Hak atas Tanah secara Aman*, Yogyakarta, MediaPressind, 2015.
- Darwinsyah, Minin dan Oloan Sitorus, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT Raja Jakarta, Grafindo Persada, 2016.
- H. Abdurahman, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2002.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia dan Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta, Revka Petra Media, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, Karunika, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitiaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta, Karya Media, 2010.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesi Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, P.T. Tarsito, 2002.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Soimin, Soedharyo, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.

Sumarjono, Maria S. W., *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas, 2001.

_____, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Sutrisno, Hadi, *Metode Penelitian Skripsi Tesis Dan Karya Ilmiah Lainnya*, Yogyakarta, Liberty, 1998.

Wahyu Utomo Hatta Isnaini, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Kencana, 2020.

Zainal Asikin dan Amiruddin Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2004.

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 (telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyelesaian Keterlambatan Peralihan Hak Atas Tanah dari Akta Jual Beli yang Belum Diproses Atau Didaftarkan Oleh PPAT Sementara (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 81 Tahun 2012 Di Kabupaten Mojokerto)

RASSAM FUADI, Dr. Agus Sudaryanto S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

JURNAL

Heri Fikry Saptoto, “*Eksistensi PPAT Sementara Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Sleman*”, *Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2017.

Tri Ulfi Handayani, Anis Mashdurohatun “*Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*”, Vol 5 No 1 Maret 2018.

TESIS

Albab, Syairozi Ulil, “*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Kabupaten Situbondo)*”, Tesis, Program Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Rismayanthi, Ida Ayu Wulan, “*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Udayana Bali, 2016.

Primipara, Ardisetyaning Cintia, “*Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2021.

INTERNET

Sahid Raharjo, “Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data”, <https://www.konsistensi.com>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2020.

Diakses dari <https://www.hukum-hukum.com/2015/08/asas-terang-dan-tunai-dalam-hukum.html>, Asas Terang dan Tunai dalam Hukum Pertanahan, Diakses Pada Tanggal 09 Januari 2023.

ML Sumartoputra, Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) Dalam Pembuatan Akta Otentik, <http://repository.unpas.ac.id> Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2023.15:08). Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2023



Penyelesaian Keterlambatan Peralihan Hak Atas Tanah dari Akta Jual Beli yang Belum Diproses Atau Didaftarkan Oleh PPAT Sementara (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 81 Tahun 2012 Di Kabupaten Mojokerto)

RASSAM FUADI, Dr. Agus Sudaryanto S.H., M.Si.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Cermati, Tata Cara Lengkap Mengurus Surat Perjanjian Jual Beli Tanah,

<https://www.cermati.com/artikel/tata-cara-lengkap-mengurus-surat-perjanjian-jual-beli-tanah>.

Diakses Pada Tanggal 02